

SAMPAH PLASTIK

Penyimpangan Reekspor di Luar Kendali

JAKARTA, KOMPAS — Dugaan penyimpangan reekspor kontainer berisi plastik dan limbah berbahaya dari Indonesia ke Amerika Serikat berada di luar kontrol pemerintah. Meski demikian, kementerian dan lembaga pemerintah terkait reekspor itu akan berkoordinasi untuk menyelidikinya.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surtantoro mengatakan, pihaknya telah memeriksa dokumen reekspor dua perusahaan daur ulang kertas di Jawa Timur. Dua perusahaan itu mengimpor limbah dari Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

"Dalam dokumen reekspor disebutkan, tujuannya ialah negara asal, AS dan Jerman. Jika ada pembelokan kontainer ke negara lain, itu di luar kontrol kami," kata Deni di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Sebelumnya, Yayasan Nexus3, organisasi nonprofit bi-

dang kesehatan dan pembangunan lingkungan serta masuk International Pollutant Elimination Network (IPEN), menemukan penyimpangan reekspor limbah ke AS dari PT MSE dan PT SM di Jawa Timur.

Dari 58 kontainer berisi plastik dan limbah berbahaya yang seharusnya dikembalikan ke AS, 38 kontainer dialihkan ke India, tiga ke Korea Selatan, dan masing-masing satu kontainer ke Thailand, Vietnam, Meksiko, Belanda, dan Kanada.

Yuyun Ismawati, aktivis Indonesia dari Yayasan Nexus3, menuding Pemerintah Indonesia mengizinkan reekspor kontainer-kontainer dari AS ke negara lain. "Para pejabat Indonesia terlibat permainan perdagangan limbah global terselubung setelah berjanji impor limbah plastik ilegal dikembalikan ke negara asal," katanya.

Menurut Deni, Pemerintah Indonesia tak mengizinkan perusahaan pengimpor mereekspor limbah itu ke negara lain

selain negara asal. Itu termuat dalam dokumen reekspor.

PT MSE yang mengimpor 38 kontainer berisi limbah berbahaya dari AS diwajibkan mereekspor 38 kontainer itu ke AS dan PT SM yang mengimpor 20 kontainer limbah berbahaya dari Jerman wajib mereekspor 20 kontainer itu ke Jerman. "Kewenangan Pemerintah Indonesia hanya sampai pelabuhan muat Indonesia," ujarnya.

Penyimpangan reekspor terjadi di luar wilayah Indonesia. Jika berlayar di lautan bebas, kewenangan pada agen pelayaran internasional. Terkait hal itu, pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Wakil Menteri LHK Alue Dohong, pihaknya akan menindaklanjuti hal itu. "Kami akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Luar Negeri," ujar Alue yang berada di Seoul, Korea Selatan, dihubungungi dari Jakarta. (JUM)